



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/281/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 13 September 2018 Nomor : 050/5987/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019;
 2. Berita acara tanggal 29 Agustus 2019 Nomor: 050/5507/35.07.202.2018 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019.

3. Surat Pernyataan Camat Ampelgading Kabupaten Malang tanggal 30 Agustus 2018 Nomor: 050/315/35.07.06/2018.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Kerja yang telah ditetapkan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen
pada tanggal : 31 Desember 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
AMPELGADING KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

**RENCANA KERJA
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

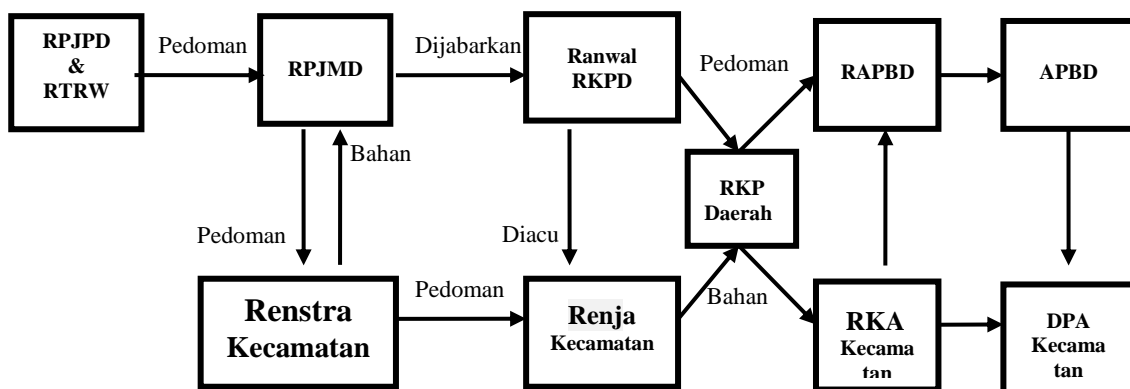
Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 Nomor: 050/601/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019. Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang melaksanakan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/281/KEP/35.07.013/2018 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019. Berdasarkan Surat Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Agustus 2018 Nomor: 050/5072/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, Tim Penyusun Rencana Kerja menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman Akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Ampelgading selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2019 mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ampelgading tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ampelgading untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Ampelgading berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/281/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2019 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ampelgading tahun 2019 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019
2. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN AMPELGADING TAHUN 2017

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Ampelgading
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ampelgading
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN AMPELGADING.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ampelgading
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN AMPELGADING

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN AMPELGADING
TAHUN 2017

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 program dan 27 kegiatan. Semua Kegiatan dimaksud tercapai 100 % antara lain Penataan Administrasi Kependudukan, Pelatihan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengendalian Keamanan Lingkungan, dan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 program dan 24 kegiatan, Perkiraan Capaian Kinerja sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 100 %, sedangkan Capaian kinerja Kecamatan Ampelgading sampai dengan Tribulan II telah tercapai 50,69 %. Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, sedangkan Program dan Kegiatan yang lain masih dalam proses pelaksanaan.

Capaian Renstra Kecamatan Ampelgading sampai dengan Tahun 2018 rata-rata mencapai 55 %. Capaian tersebut disebabkan adanya perbedaan Indikator dan target kinerja setelah adanya Perubahan RPJMD dan Renstra Kecamatan sehingga capaian tidak diakumulasi.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 dan tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2018
Kecamatan Ampelgading

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/ kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (7+9)	11 (10/4)
Urusan:Penunjang lainnya										
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6000 buah	1000 buah	1000 buah	1000 buah	100	1000 surat	3000 buah	50
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	12 rekening	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40*
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	528 OB	96 OB	96 OB	96 OB	100	84 OB	276 OB	52
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100	12 OB	36 OB	50
5	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	63 Jenis	63 Jenis	63 Jenis	63 Jenis	100	63 jenis	63 jenis	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penguasaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
8	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	18000 kotak	3000 kotak	3000 kotak	3000 kotak	100	3000 kotak	9000 kotak	50
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	40 HOK	-	-	-	-	10 HOK	10 HOK	25

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/ kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (7+9)	11 (10/4)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1400 hok	300 HOK	300 hok	300 hok	100	200 hok	800 hok	57
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	25
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
5	Pengadaan Perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dibutuhkan	7 jenis	-	-	-	-	7 jenis	7 jenis	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	84 stel	14 stel	14 stel	14 stel	100	14 stel	42 stel	50
2	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	120 stel	20 stel	20 stel	20 stel	100	20 stel	60 stel	50
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/ kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (7+9)	11 (10/4)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	42 buku	7 buku	7 buku	7 buku	100	7 buku	21 buku	50
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	12 buku	2 buku	2 buku	2 buku	100	2 buku	6 buku	50
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100	1 buku	3 buku	50
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	66,30%	66,3 %	97,5 %	97,5 %	100	-	97,5 %	100
1	Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah kegiatan pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100	-	8 kali	100
2	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingknngn	jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	24 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	-	24 kegiatan	100
VI	Program penataan administrasi kependudukan	kelancaran proses administrasi kependudukan	100 %	100%	100%	100%	100	-	100%	100
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	jumlah proses pelayanan administrasi kependudukan	3400 pengajuan	1700 pengajuan	1700 pengajuan	1700 pengajuan	100		3400 pengajuan	100
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam	71,20%	71,20%	70%	75%	110	-	75%	110
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	-	2 kali	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/ kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (7+9)	11 (10/4)
VIII	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	48 kegiatan	-	-	-	-	12 kegiatan	12 kegiatan	25
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	48 kegiatan	-	-	-	-	12 kegiatan	12 kegiatan	25
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 kegiatan	-	-	-	-	12 kegiatan	12 kegiatan	25
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	48 kegiatan	-	-	-	-	12 kegiatan	12 kegiatan	25
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kali	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	11 Jenis	-	-	-	-	11 Jenis	11 Jenis	100
		Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	6800 pengajuan	-	-	-	-	1700 pengajuan	1700 pengajuan	25

*) = Karena ada perbedaan Indikator dan target kinerja setelah adanya Perubahan RPJMD dan Renstra Kecamatan sehingga capaian tidak diakumulasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Ampelgading, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Ampelgading dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja sesuai periode renstra 2016-2021, pelayanan Kecamatan Ampelgading tahun 2018 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Ampelgading yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Ampelgading, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan berdasarkan perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Ampelgading, yaitu:

1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.
2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan

Pencapaian Kinerja Kecamatan Ampelgading terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2016-2018 menggunakan indikator :

1. Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam. Dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Usulan Musrenbangcam yang disepakati dlm Musrenbangkab}}{\sum \text{Usulan dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$$

2. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan. Dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Pengajuan KTP, KK, Mutasi yang terlayani}}{\sum \text{Pengajuan KTP, KK, Mutasi yang diterima}} \times 100\%$$

3. Persentase Keaktifan Siskamling. Dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kelompok Siskamling Aktif}}{\sum \text{seluruh Kelompok Siskamling}} \times 100\%$$

Sedangkan IKU Kecamatan Ampelgading Tahun 2019-2021 adalah:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Rata – Rata tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$$

2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Kehadiran Stekholder non PNS}}{\sum \text{seluruh undangan yang hadir}} \times 100\%$$

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading dapat dilihat dari **Tabel 2.2** berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ampelgading												
1	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			70 %	88,5 %	-	-	70 %	76,92 %	-	-	
2	Persentase kelancaran proses administrasi kependudukan a. KTP b. KK c. Pindah tempat			100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	-	-	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	-	-	
3	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			97,5 %	97,6 %	-	-	97,5 %	96 %	-	-	
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.			-	-	80 %	85 %	-	-	80 %	85 %	
5	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	-	82,21	82,61	-	-	82,21	82,61	
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan												
I	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	
1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			1000 buah	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 buah	1000 surat	1000 surat	1000 surat	
2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
3	Jumlah pejabat pengelola			96 OB	84 OB	84 OB	84 OB	96 OB	84 OB	84 OB	84 OB	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Jumlah Perlengkapan kantor yang dibutuhkan			-	7 jenis	7 jenis	7 jenis	-	7 jenis	7 jenis	7 jenis	
III	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			14 stel	14 stel	14 stel	14 stel	14 stel	14 stel	14 stel	14 stel	
2	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)			20 stel	20 stel	20 stel	20 stel	20 stel	20 stel	20 stel	20 stel	
IV	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)			7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	
2	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)			2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
3	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	
V	Persentase Keaktifan Siskamling			97,5 %	-	-	-	97,5 %	-	-	-	
1	jumlah kegiatan pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan			4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	
2	jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan			12 kegiatan	-	-	-	12 kegiatan	-	-	-	
VI	kelancaran proses administrasi kependudukan			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
1	jumlah proses pelayanan administrasi kependudukan			1700 pengajuan				1700 pengajuan				
VII	persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam			70%	-	-	-	70%	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	
VIII	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
1	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan			-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
2	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa			-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
3	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
4	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat			-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
5	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
6	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan			-	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	-	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	
7	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses			-	1700 pengajuan	1700 pengajuan	1700 pengajuan	-	1700 pengajuan	1700 pengajuan	1700 pengajuan	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Ampelgading

Permasalahan yang ada Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat PD, padahal PD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengasuan masyarakat;
- c. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.
- d. Terbatasnya pemahaman Pelaku Usaha mengenai pentingnya pengurusan Ijin Paten
- e. Kurang pahamiannya masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan terutama pengurusan Akta Kematian yang berakibat pada validitas data Kependudukan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Ampelgading secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%.

Warga desa mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-El, dan masih banyak KTP-el yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 bulan kali.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Ampelgading tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

- a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Ampelgading dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Ampelgading, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
 - b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
 - c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
 - 1. Adanya SPPT ganda;
 - 2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut.

Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan: Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang;
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;

- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat :

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayannya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Ampelgading	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	308.499.500,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Ampelgading	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	224.249.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ampelgading	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ampelgading	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec. Ampelgading	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 rek	9.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec. Ampelgading	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 rek	9.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Ampelgading	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 ob	55.920.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Ampelgading	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 ob	42.720.000,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	13.200.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	13.200.000,00	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	63 jenis	38.830.000,00	Penyediaan Alat tulis Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	63 jenis	15.835.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ampelgading	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	11.399.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ampelgading	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	11.399.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kec. Ampelgading	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.650.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kec. Ampelgading	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.650.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Makanan Minuman	Kec. Ampelgading	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	500 hok	59.900.000,00	Penyediaan Makanan Minuman	Kec. Ampelgading	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	500 hok	60.545.000,00	
	Rapat-rapat koordi-nasi dan konsultasi luar daerah	Kec. Ampelgading	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	10 hok	5.250.000,00	Rapat-rapat koordi-nasi dan konsultasi luar daerah	Kec. Ampelgading	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	10 hok	5.250.000,00	
	Rapat-rapat koordi-nasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Ampelgading	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 hok	35.100.000,00	Rapat-rapat koordi-nasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Ampelgading	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 hok	57.650.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Ampelgading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	88.437.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Ampelgading	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	116.437.000,00	
						Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah Perlengkapan kantor yang dibutuhkan (unit)	7 jenis	28.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Dinas	Kec. Ampelgading	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	6.050.000,00	Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Dinas	Kec. Ampelgading	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	6.050.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 unit	34.347.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 unit	34.347.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Ampelgading	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	33.040.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Ampelgading	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	33.040.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 paket	15.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Ampelgading	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 paket	15.000.000,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Ampelgading	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8.500.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Ampelgading	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	8.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Kec. Ampelgading	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 stel	4.900.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Kec. Ampelgading	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 stel	4.900.000,00	
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kec. Ampelgading	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	17 stel	3.600.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kec. Ampelgading	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	17 stel	3.600.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Ampelgading	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	7.972.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Ampelgading	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	7.972.000,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja PD	Kec. Ampelgading	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	7 dok	6.250.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja PD	Kec. Ampelgading	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	7 dok	6.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. Ampelgading	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 lap	384.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. Ampelgading	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 lap	384.000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Ampelgading	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 lap	1.338.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Ampelgading	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 lap	1.338.000,00	
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kec. Ampelgading	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	12 keg	157.841.500,00	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kec. Ampelgading	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	12 keg	286.841.500,00	
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban lingkungan	Kec. Ampelgading	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 keg	58.060.000,00	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban lingkungan	Kec. Ampelgading	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 keg	105.511.100,00	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Kec. Ampelgading	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	12 keg	23.588.500,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Kec. Ampelgading	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	12 keg	42.866.500,00	
	Pembinaan Kesejahteraan dan kepemudaan	Kec. Ampelgading	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	12 keg	20.216.500,00	Pembinaan Kesejahteraan dan kepemudaan	Kec. Ampelgading	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	12 keg	36.739.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Ampelgading	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	12 keg	6.432.000,00	Pengendalian Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Ampelgading	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	12 keg	28.326.800,00	
		Kec. Ampelgading	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 keg	15.587.500,00		Kec. Ampelgading	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 keg	11.688.800,00	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kec. Ampelgading	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	12 keg	21.654.000,00	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kec. Ampelgading	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	12 keg	28.326.800,00	
		Kec. Ampelgading	Jumlah Pelayanan terpadu kecamatan (jenis)	11 jenis	12.303.000,00		Kec. Ampelgading	Jumlah Pelayanan terpadu kecamatan (jenis)	11 jenis	39.351.300,00	
JUMLAH					515.000.000,00	JUMLAH					644.000.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Ampelgading sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ampelgading

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan

dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendukung Misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Peningkatan Kepuasan masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Ampelgading.

b. Sasaran

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Ampelgading

Tujuan dan Sasaran tersebut diatas untuk menunjang Misi ke 2 MADEP MANTEB MANETEB yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
- j. Penyediaan makanan dan minuman;
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- c. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- d. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- e. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- f. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- g. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi lainnya										
4.05.4.05.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Ampelgading	100%	224.249.000,00	APBD		100%	224.249.000,00	
4.05.4.05.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Ampelgading	1000 buah	5.000.000,00	APBD		1000 buah	5.000.000,00	
4.05.4.05.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Ampelgading	12 bulan	9.000.000,00	APBD		12 bulan	9.000.000,00	
4.05.4.05.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Ampelgading	84 ob	42.720.000,00	APBD		84 ob	42.720.000,00	
4.05.4.05.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Ampelgading	12 ob	13.200.000,00	APBD		12 ob	13.200.000,00	
4.05.4.05.07.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Ampelgading	63 jenis	15.835.000,00	APBD		63 jenis	15.835.000,00	
4.05.4.05.07.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Ampelgading	2 jenis	11.399.500,00	APBD		2 jenis	11.399.500,00	
4.05.4.05.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Ampelgading	1 jenis	3.650.000,00	APBD		1 jenis	3.650.000,00	
4.05.4.05.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Ampelgading	500 hok	60.545.000,00	APBD		500 hok	60.545.000,00	
4.05.4.05.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kec. Ampelgading	10 hok	5.250.000,00	APBD		10 hok	5.250.000,00	
4.05.4.05.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Ampelgading	100 kali	57.650.000,00	APBD		100 kali	57.650.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kec. Ampelgading	100%	116.437.000,00	APBD		100%	116.437.000,00	
4.05.4.05.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)	Kec. Ampelgading	7 jenis	28.000.000,00	APBD		7 jenis	28.000.000,00	
4.05.4.05.07.02.13	Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Ampelgading	1 unit	6.050.000,00	APBD		1 unit	6.050.000,00	
4.05.4.05.07.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Ampelgading	1 unit	34.347.000,00	APBD		1 unit	34.347.000,00	
4.05.4.05.07.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Ampelgading	7 unit	33.040.000,00	APBD		7 unit	33.040.000,00	
4.05.4.05.07.02.20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Ampelgading	1 paket	15.000.000,00	APBD		1 paket	15.000.000,00	
4.05.4.05.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kec. Ampelgading	100%	8.500.000,00	APBD		100%	8.500.000,00	
4.05.4.05.07.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kec. Ampelgading	17 stel	4.900.000,00	APBD		17 stel	4.900.000,00	
4.05.4.05.07.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	Kec. Ampelgading	17 stel	3.600.000,00	APBD		17 stel	3.600.000,00	
4.05.4.05.07.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kec. Ampelgading	100%	7.972.000,00	APBD		100%	7.972.000,00	
4.05.4.05.07.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	Kec. Ampelgading	7 dok	6.250.000,00	APBD		7 dok	6.250.000,00	
4.05.4.05.07.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Ampelgading	2 lap	384.000,00	APBD		2 lap	384.000,00	
4.05.4.05.07.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Ampelgading	1 lap	1.338.000,00	APBD		1 lap	1.338.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.07.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	Kec. Ampelgading	100%	286.841.500,00	APBD		100%	286.841.500,00	
4.05.4.05.07.30.01	Pembinaan Kesejahteraan dan kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Ampelgading	12 keg	36.739.000,00	APBD		12 keg	36.739.000,00	
4.05.4.05.07.30.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Kec. Ampelgading	12 keg	42.866.500,00	APBD		12 keg	42.866.500,00	
4.05.4.05.07.30.03.	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban lingkungan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kec. Ampelgading	12 keg	105.511.100,00	APBD		12 keg	105.511.100,00	
4.05.4.05.07.30.04	Pengendalian Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Ampelgading	12 keg	11.688.800,00	APBD		12 keg	11.688.800,00	
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Ampelgading	1 kkeg	28.326.800,00	APBD		1 kkeg	28.326.800,00	
4.05.4.05.07.30.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Ampelgading	12 keg	39.351.300,00	APBD		12 keg	39.351.300,00	
		Jumlah Pelayanan terpadu kecamatan (jenis)	Kec. Ampelgading	11 jenis	22.358.000,00	APBD		11 jenis	22.358.000,00	
JUMLAH					644.000.000,00			JUMLAH	644.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN AMPELGADING

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ampelgading Tahun 2019

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Ampelgading	100%	224.249.000,00	APBD	
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Ampelgading	1000 buah	5.000.000,00	APBD	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Ampelgading	12 rek	9.000.000,00	APBD	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Ampelgading	84 ob	42.720.000,00	APBD	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Ampelgading	12 ob	13.200.000,00	APBD	
6	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Ampelgading	63 jenis	15.835.000,00	APBD	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Ampelgading	2 jenis	11.399.500,00	APBD	
8	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Ampelgading	1 jenis	3.650.000,00	APBD	
9	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Ampelgading	500 hok	60.545.000,00	APBD	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kec. Ampelgading	10 hok	5.250.000,00	APBD	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Ampelgading	100 kali	57.650.000,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kec. Ampelgading	100%	116.437.000,00	APBD	
13	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)	Kec. Ampelgading	7 jenis	28.000.000,00	APBD	
14	Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Ampelgading	1 unit	6.050.000,00	APBD	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Ampelgading	1 unit	34.347.000,00	APBD	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Ampelgading	7 unit	33.040.000,00	APBD	
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Ampelgading	1 paket	15.000.000,00	APBD	
18	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kec. Ampelgading	100%	8.500.000,00	APBD	
19	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kec. Ampelgading	17 stel	4.900.000,00	APBD	
20	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	Kec. Ampelgading	17 stel	3.600.000,00	APBD	
21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kec. Ampelgading	100%	7.972.000,00	APBD	
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	Kec. Ampelgading	7 dok	6.250.000,00	APBD	
23	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Ampelgading	2 lap	384.000,00	APBD	
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Ampelgading	1 lap	1.338.000,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	Kec. Ampelgading	100%	286.841.500,00	APBD	
26	Pembinaan Kesejahteraan dan kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Ampelgading	12 keg	36.739.000,00	APBD	
27	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Kec. Ampelgading	12 keg	42.866.500,00	APBD	
28	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban lingkungan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kec. Ampelgading	12 keg	105.511.100,00	APBD	
29	Pengendalian Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Ampelgading	12 keg	11.688.800,00	APBD	
30		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Ampelgading	1 keg	28.326.800,00	APBD	
31	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Ampelgading	12 keg	39.351.300,00	APBD	
32		Jumlah Pelayanan terpadu kecamatan (jenis)	Kec. Ampelgading	11 jenis	22.358.000,00	APBD	
JUMLAH					644.000.000,00		

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 – 2021.

Pada tahun 2019 Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading ini terdapat 5 program dan 24 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2019, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2019 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,



SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyara- kat terhadap layan- an publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata - Rata tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayan- an Penyelenggara- an Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\sum \text{Kehadiran Stekholder non PNS}}{\sum \text{seluruh undangan yang hadir}} \times 100\%$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\sum \text{Tugas Umum Pemerintahan yg terfasilitasi}}{\sum \text{seluruh tugas Umum pemerintahan yg ada}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\sum \text{Kehadiran Stekholder non PNS}}{\sum \text{seluruh undangan yang hadir}} \times 100\%$	71,25 %	88,4 %	-	-	-
2	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan: KTP, KK, Mutasi	$\frac{\sum \text{Pengajuan KTP, KK, Mutasi yang terlayani}}{\sum \text{Pengajuan KTP, KK, Mutasi yang diterima}} \times 100\%$	100% 100% 100%	100% 100% 100%	-	-	-
3	Persentase Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Siskamling	$\frac{\sum \text{Kelompok Siskamling Aktif}}{\sum \text{seluruh Kelompok Siskamling}} \times 100\%$	66,3 %	97,5 %	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata - Rata tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	-	-	80,50	80,6	80,7
5	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\sum \text{Kehadiran Stekholder non PNS}}{\sum \text{seluruh undangan yang hadir}} \times 100\%$	-	-	76,2 %	76,3 %	76,4 %

